

Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)

Concept of Prevention and Improvement of Slums (Case Study: Slum Settlement in Cimpu Area, Suli District, Luwu Regency)

Ibrahim Jabir Baharuddin¹, Rudi Latief², Muhammad Idris Taking¹

¹ Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

² Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

baimjabir@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima;12-11-2022

Direvisi;08-12-2022

Disetujui;16-12-2022

Abstract. *The purpose of this study was to analyze the level of slums and formulate the concept of prevention and improvement of the quality of slum settlements in the Cimpu area, Suli District, Luwu Regency. This type of research is a mix method research. To analyze the level of slums in the Cimpu area, Suli sub-district, Luwu district using a baseline scoring analysis tool, while to formulate the concept of preventing and improving the quality of slum settlements in the Cimpu area, a technical design is used in the form of three dimensions (3D). The main conclusion in this study is that based on the results of the baseline scoring analysis, it shows that the level of slums in the Cimpu area, Suli District, Luwu Regency is in the medium slum category and the concept of prevention and improvement of slum settlements in the Cimpu Area, Suli District, Luwu Regency consists of two, namely prevention and improvement quality. The concept of prevention is implemented through a pattern of supervision, control, and community empowerment, while the concept of quality improvement is implemented through a pattern of restoration, rejuvenation, and resettlement.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tingkat kekumuhan dan merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian mix method. Untuk menganalisis tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu menggunakan alat analisis skoring baseline sedangkan untuk merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu menggunakan desain teknis dalam bentuk tiga dimensi (3D).

Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang dan konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdiri atas dua, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Konsep pencegahan dilaksanakan melalui pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan konsep peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

Keywords:

*Konsep;
Pencegahan;;
Permukiman Kumuh;*

Corresponden author:

Email: baimjabir@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Upaya penanganan permukiman kumuh telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, yang di tuangkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh yang menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan akan bahaya kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan di Kabupaten Luwu yang menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Di lain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. Selain itu, permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu, secara umum kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya, sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti munculnya kantung-kantung permukiman pada lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*squatters*), tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan

Salah satu desa di Kecamatan Suli yaitu Kawasan Cimpu patut menjadi perhatian. Dikarenakan banyaknya kondisi rumah penduduk yang merupakan bangunan yang tidak permanen, banyaknya jalan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan. Selain itu sulitnya air bersih dan saluran air yang tidak teratur, pembuangan sampah/kotoran sembarangan akibat perilaku warga yang tidak mempertimbangkan kebersihan maupun kesehatan dengan membuang air limbah rumah tangga di sungai mengakibatkan sampah yang menumpuk dan bau kotor/jorok tak terbendung lagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kondisi bagaimana tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu dan menyusun konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

2. METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah kawasan yang menjadi objek penelitian dari Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Perumahan Dan Permukiman Kumuh yakni di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu berdasarkan SK Bupati Luwu Nomor 219/IV/2022 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Etta, Sopiah, 2010). Dalam penelitian ini, jumlah populasi diketahui secara pasti jumlahnya (*finite population*), yaitu penelitian menggunakan populasi unit hunian pada Kawasan Permukiman Cimpu, dengan jumlah populasi unit hunian sebanyak 297 unit bangunan.

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability* dengan teknik *simple random sampling*. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah kepala keluarga pada kawasan sebanyak 297 Kepala Keluarga dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan

teknik Slovin. Berdasarkan perhitungan menggunakan Rumus Slovin menunjukkan bahwa total sampel penelitian sebanyak 74,8 atau dibulatkan menjadi 75 kepala keluarga.

2.3. Metode Analisis

a. Skoring *Baseline*

Adapun tingkat kekumuhan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Tingkat kekumuhan ringan yaitu interval antara 19-44;
- 2) Tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70; dan
- 3) Tingkat kekumuhan berat yaitu interval antara 71-95.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekumuhan yang terjadi di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terlebih dahulu mengidentifikasi terhadap 7 (tujuh) aspek kondisi fisik yang membuat kawasan tersebut menjadi kumuh.

b. Penyusunan Desain Teknis

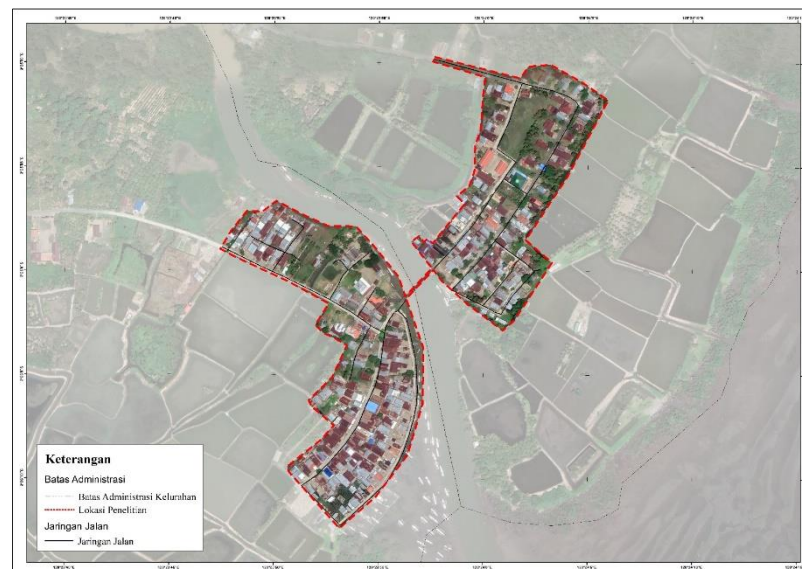
Tujuan penyusunan desain teknis yaitu untuk memperoleh list/daftar komponen infrastruktur prioritas yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan gambar kerja yang siap diimplementasikan dalam bentuk visualisasi 3 dimensi (3D).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, lebih tepatnya berada di Dusun Mura Utara Desa Cimpu Utara dan Dusun Muara selatan Desa Cimpu dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan Kawasan yang saat ini menjadi lokasi permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Luwu Nomor 219/IV/2022 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu.

Secara administrasi Kawasan Cimpu memiliki luas wilayah mencapai 11,96 Ha yang terbagi atas 2 dusun dan 2 RT, yang mana posisi geografis terletak pada LS 3° 26' 0,304" BT 120° 23' 56,967". Jumlah penduduk di Kawasan Cimpu pada tahun 2022 adalah 1.088 jiwa yang tersebar di 2 Dusun. Berdasarkan Total Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 410 jiwa dan perempuan sebanyak 678 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 297 KK.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

3.2. Analisis Tingkat Kekumuhan

Untuk mengetahui tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu menggunakan alat analisis skoring baseline berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun hasil analisis skoring baseline di Kawasan Cimpu yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria dan Indikator Penentuan Tingkat Kekumuhan di Kawasan Cimpu

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)						
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RTRW, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	3	Dokumen RTRW & RPJMD, Format Isian Observasi
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RTRW, dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha ○ Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% -100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5	Dokumen RTRW & RPJMD, Dukumen IMB Format Isian Peta Lokasi
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • Keselamatan bangunan gedung (BG) • Kenyamanan BG • Kemudahan BG 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 76% -100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi dan Observasi
		Kualitas Permukaan JalanLingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> 76% -100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi dan Observasi
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> 51%-75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	3	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
		Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan rutin ; dan/atau Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> 76% -100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana : <ul style="list-style-type: none"> Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada 	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			skala lingkungan; dan <ul style="list-style-type: none"> • Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 			
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Pevadahan dan pemilahan domestik; • Pengumpulan lingkungan; • Pengangkutan lingkungan; • Pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin; dan/atau • Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air; • Jalan lingkungan; • Sarana komunikasi; • Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan • Bangunan pos kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Mobil pompa; 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan Peralatan pendukung lainnya 			
TOTAL NILAI INDIKATOR					58.0	
KONDISI KEKUMUHAN					KUMUH SEDANG	
B. Identifikasi Legalitas Lahan						
1.	Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa : <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+)	Wawancara, Format Isiani, Dokumen Pertanahan dan Observasi
		Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)	<ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan lokasi berada pada Zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara, Format Isiani, Dokumen RTRW, RDTR dan Observasi
C. Identifikasi Pertimbangan Lain						
1.	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: <ul style="list-style-type: none"> Fungsi strategis kabupaten/kota; atau Bukan fungsi strategis kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	1	Wawancara, Format Isiani, Dokumen RTRW, RDTR dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha • Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha • Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <151 jiwa/Ha 	1	Wawancara, Format Isiani, Statistik dan Observasi
		Kondisi Sosial, ekonomi dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara 	2	Wawancara, Format Isiani dan Observasi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu mendapatkan nilai 58 yang masuk dalam tingkat kumuh sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, masih luasnya area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Selain itu masih luasnya area yang memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau, dan juga di Kawasan Cimpu tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran

3.3. Analisis Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diawali dari isu strategis dan permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kawasan Cimpu. Isu dan permasalahan tersebut dirumuskan berdasarkan 7 aspek kekumuhan yang selanjutnya dibutuhkan konsep dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh. Rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh disusun berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 yang memuat prinsip desain universal. Untuk lebih

jelasan sebagaimana pada tabel dan gambar dibawah.

Tabel 3. Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu

Aspek Yang Diamati	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Kampanye lingkungan rumah sederhana sehat	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi semula Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bangunan tidak layak huni
Jalan Lingkungan	Pengawasan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai standar jalan lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
Air Bersih	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Penyediaan jaringan air minum Peningkatan kapasitas air bersih permukiman
Drainase Lingkungan	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai kebersihan lingk.	Peningk. kapasitas saluran drainase permukiman
	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	-	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai pembangunan drainase lingk.	-
Saluran Air Limbah	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peyediaan saluran air limbah permukiman Peningkatan kapasitas saluran air limbah permukiman
Pengelolaan Persampahan	Pemberdayaan	Permukiman kembali	Sosialisasi penanganan persampahan	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan
Proteksi Kebakaran	Pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Pencegahan penanggulangan kebakaran	Penyediaan hydrant kebakaran pada unit-unit lingkungan permukiman

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4. KESIMPULAN

Tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, masih luasnya area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Selain itu masih luasnya area yang memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau, dan juga di Kawasan Cimpu tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdiri atas dua, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Konsep pencegahan dilaksanakan melalui pola

pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan konsep peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2016). *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (No. 2 Tahun 2016)*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Indonesia
- Pemerintah Kabupaten Luwu. (2022). *Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu (No.299-a Tahun 2016)*. Pemerintah Kabupaten Jeneponto: Indonesia
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23 ed.)*. Penerbit Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia. (2011). *tentang Perumahan dan Permukiman (No.1 Tahun 2011)*. Sekretariat Negara: Indonesia